

# SEKOLAH POLITIK SILIHWANGI DAN PEMBANGUNAN KESADARAN POLITIK PEMUDA KOTA TASIKMALAYA

Randi Muchariman<sup>1</sup>, Hendra  
Gunawan<sup>2</sup>, Subhan Agung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Politik,  
Universitas Siliwangi, Kota  
Tasikmalaya, Indonesia

Artikel

Diterima : 12 Januari 2023

Disetujui : 12 Februari 2023

Email :

randimuchariman@unsil.ac.id

## Abstrak

Pemuda adalah salah satu pemilih pemula dengan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Penting bagi pemuda memiliki kesadaran politik yang dapat mendorong partisipasi politik yang baik. Untuk tujuan tersebut, Sekolah Politik Silihwangi (SPS) sebagai program pengabdian telah melakukan kolaborasi dengan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya sehingga mampu mendeklarasikan Milenial Political Prosperous Peaceful (MP3) sebagai komunitas taktis yang menaungi gerakan pelajar untuk kesadaran dan partisipasi politik. Kolaborasi tersebut dapat terlaksana melalui SPS tingkat menengah, yakni sebuah sekolah politik yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama sesuai keperluan kedua belah pihak, yakni penyelenggara SPS dan pesertanya. Program ini telah menunjukkan bahwa usaha untuk membangun sebuah kolaborasi memungkinkan bagi sebuah gerakan untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik. Tentu masih banyak proses yang harus dilakukan, namun deklarasi MP3 merupakan awal bagi perkembangan selanjutnya.

**Kata Kunci:** Sekolah Politik, Gerakan Pelajar, Kesadaran Politik,

## Abstract

*Youth is one of the first-time voters with a sizable number in Indonesia. It is important for youth to have political awareness which can encourage good political participation. For this purpose, the Silihwangi Political School (SPS) as a service program has collaborated with Pelajar Islam Indonesia (PII) and Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Tasikmalaya City. The Collaboration are able to declare Millennial Political Prosperous Peaceful (MP3) as a tactical community that houses student movements for awareness and participation political. The Collaboration can be carried out through the middle -level SPS, a political school that is arranged based on a mutual agreement according to the needs of both, the SPS facilitator and their participants. This program has shown that efforts to build a collaboration make it possible for a movement to build awareness and political participation. Of course there is still a lot of work to be done, but the MP3 declaration is a start for further developments.*

**Keywords:** Political School, Student Movements, Political Awareness

## PENDAHULUAN

Peningkatan kesadaran politik mungkin menjadi sesuatu yang sulit dalam kondisi politik yang tidak ideal. Ketika sebagian besar praktik politik bermakna uang dan jabatan, maka pengaturan urusan publik menjadi makna yang sedikit relevan bagi sebuah kesadaran politik. Keadaan ini telah memaksa satu keadaan yang sulit dimana hukum permintaan dan penawaran berlaku, bahwa penawaran yang melimpah politik uang dan jabatan akan membuat harganya menjadi murah sehingga semakin banyak jumlah permintaan yang dapat dipenuhi. Tumbuh pasar baru dalam penawaran dan permintaan ini. Namun ketika penawaran akan politik sebagai pengaturan urusan publik sangat sedikit, maka menyebabkan harganya mahal dan hanya sedikit permintaan yang dapat ditumbuhkan dalam pasar ini.

Pasar akan tumbuh jika jumlah permintaan diperbanyak dan akhirnya memaksa pasar untuk memberikan penawarannya yang terbaik. Jadi, yang diperlukan sekarang adalah memperbanyak permintaan akan makna politik sebagai sebuah pengaturan urusan publik sehingga system politik pada akhirnya akan dipaksa untuk berubah. Artinya, perlu kepada proses penyadaran politik yang semakin menyebar dan mengakar sehingga perubahan terjadi.

Pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) ini berusaha untuk menjawab apakah program peningkatan kesadaran politik dapat memberikan dampak bagi perubahan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong suatu perubahan. Perubahan yang dapat dijadikan acuan pada pengmas ini adalah perubahan persepsi masyarakat atau pembentukan persepsi masyarakat bahwa politik itu adalah suatu pengaturan akan urusan publik, bukan sekedar mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginan orang yang lainnya melalui berbagai usaha dan jenis kekuasaan (Budiarjo, 2008:15).

Heywood (2019:36) misalnya menjelaskan bahwa politik secara definisi salah satunya dapat diambil dari kata *polis* yang berasal dari sejarah Yunani kuno. *Polis* adalah sebuah tata pemerintah yang independent dan berpengaruh bagi satu wilayah tertentu. Oleh karena itu, *polis* dapat disebut juga sebagai sebuah negara kota, salah satu diantaranya yang paling berpengaruh adalah Athena yang melaksanakan proses demokrasi dalam pengaturannya. Jadi, politik adalah kegiatan untuk mengelola negara kota ini, atau dengan kata lain adalah kegiatan yang mengatur urusan publik. Dalam pengertian ini, politik dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengatur sebuah negara.

Perubahan atau pembentukan persepsi itu dapat dimulai dari generasi muda yang merupakan peserta pemilu pemula. Sebagai pemilih pemula, maka pemuda adalah salah satu pilihan strategis untuk mendorong perubahan tersebut karena beberapa pertimbangan berikut. Pertama, jumlah pemilih pemuda cukup banyak dalam setiap pemilu akan mempengaruhi sikap dari para kontestan pemilu. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah pemilih pemula (Januari 2018 – April 2019) dari golongan pemuda untuk tingkat nasional berjumlah lebih dari 5 juta pemilih. Jumlah tersebut adalah sekitar 2,6 persen dari total pemilih nasional di tahun 2019 yang berjumlah 196,5 juta pemilih. Berdasarkan hal ini, dapat diambil kira-kira jumlah pemilih muda yang berusia antara 17 – 24 tahun misalnya dapat berjumlah di angka 15 persen.

Kedua, pemilih pemuda merupakan pemilih yang relative dapat berubah karena belum terikat dengan pilihan tradisional dan mungkin belum memutuskan untuk menjadi bagian dari komunitas atau entitas politik tertentu. Oleh sebab itu, memberikan informasi penting bagi pemuda dapat menjadi pengaruh besar dalam membentuk cara pandangnya terhadap politik dan membangun sikap yang ajeg dalam pilihan-pilihan politik di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana partisipasi pemilih pemula ini didasari oleh kesadaran politik yang beragam. Batawi (2013) misalnya menunjukkan bahwa pemilih pemula di tingkat SMA mendapatkan kesadaran politik yang didasari atas pemahaman dan pengalaman belajar konsep berpolitik di sekolah. Terdapat persoalan psikologis dalam menempatkan jati diri tentang politik dipengaruhi oleh pergaulan di antara teman sejawat di lingkup sekolah. Dalam hal ini, maka informasi yang diberikan kepada teman sejawat akan berpengaruh terhadap teman sejawat lainnya dalam rangka untuk membangun satu kesadaran politik yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hendak menunjukkan Sekolah Politik Siliwangi (SPS) sebagai salah satu alat untuk membangun kesadaran tersebut. Tulisan ini hendak menunjukkan bagaimana SPS membangun kesadaran politik bersama pemuda (yakni Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya) untuk komunitas pelajar tingkat menengah (SMA atau sederajat) di Kota Tasikmalaya melalui pembentukan Milenial Political Prosperous Peacefull (MP3). Kegiatan ini sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah bentuk Participation Action Research (PAR)

## **KAJIAN TEORI**

Sekolah Politik Siliwangi (SPS) terkait dengan dua hal, yakni kesadaran dan partisipasi. Kedua konsep ini dapat dirujuk kepada praktik demokrasi dan dinamika ideologi politik dalam perkembangan keilmuan politik. Penelusuran konsep dalam sejarah Eropa itu juga bertemu dengan kajian ilmu sosial relevan terkait dengan konteks ke Indonesiaan.

Kesadaran, digunakan oleh Marx ketika ia meminjam istilah *real* dari Hegel yang akhirnya merumuskan teori dialektika materialism. Marx menyebutkan bahwa terjadi dialektika antara kesadaran palsu dengan kesadaran benar (McLennan, 2003;43-53) sehingga akan melahirkan revolusi sebagai sebuah keniscayaan dari penindasan yang dilakukan oleh kesadaran palsu atau kapitalisme. Jadi, dalam konteks ini kesadaran dianggap sebagai sesuatu yang menggerakkan manusia dan ia bersifat materi karena berasal dari suprastruktur yang bersifat materi. Penindasan ini terjadi karena proses ekonomi politik yang dirancang dalam kapitalisme dibangun berbasis uang yang kemudian berakhir kembali menjadi uang. Marx mengungkapkan, secara alami ekonomi politik seharusnya berawal dari komoditas yang berakhir dengan komoditas. Keadaan ini telah merusak alam dan juga kehidupan sosial budaya umat manusia (Harvey, 2023; 83-90).

Gagasan kesadaran Marx ini dikritik dan diperbarui oleh Gramsci (1992) yang menyebutkan bahwa kesadaran itu bersifat intelektual dan berlaku bukan sebagai sebuah keniscayaan, tetapi karena proses hegemoni. Proses hegemoni salah satunya adalah proses keilmuan tentang bagaimana kehidupan sosial

itu dijelaskan, disebutkan persoalannya dan disebutkan jawaban dari persoalannya. Dalam cara pandang ini, maka kesadaran adalah suatu pembentukan mental tentang dunia ini dan bagaimana ia berjalan.

Jika dikaitkan dengan politik, maka kesadaran politik dapat diartikan sebagai suatu keadaan mental atau intelektual tentang bagaimana politik berlangsung, apa persoalannya, dan apa jawaban untuk pelbagai persoalan tersebut. Dalam kesadaran ini, maka terkandung satu konsekuensi pengakuan akan posisi diri dalam praktik tersebut sehingga akan mendorong partisipasi politik.

Huntington (1997) menyebut partisipasi ini sebagai satu dari dua penciri demokrasi selain dari kontestasi. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi ini mewujudkan dalam dua hal, yakni pemilu serta pemenuhan hak-hak dasar seperti kebebasan untuk berbicara, berkumpul, serta kesetaraan. Oleh karena itu, partisipasi ini sesungguhnya terkait erat juga dengan *civil society* sebagai rumah bagi demokrasi. Tentang hal ini Edwards (2011) menjelaskan *civil society* dalam lima pengertian penting yakni terkait ruang public yang bebas, asosiasi masyarakat yang otonom terhadap negara, pengakuan persamaan individu, proses tanpa kekerasan, serta *civility* yang melandasi semuanya.

Dalam konteks Indonesia memang terdapat konteks yang berbeda sehingga memerlukan suatu usaha untuk melakukan relevansi. Dalam hal ini misalnya dengan mengungkapkan makna masyarakat madani yang berbeda dengan *civil society* sebagai satu yang secara ontology berbeda (Culla, 2006). Perbedaan ini, tentunya akan membuat praktik politik dengan kesadaran dan partisipasi politik tertentu. Dalam membangun kesadaran seperti inilah makna Pendidikan politik dalam SPS.

Proses tersebut juga harus dilakukan dengan memahami keadaan subjek (manusia, peserta), yang dalam hal ini adalah generasi milenial atau gen Z. Sarofah (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendidikan politik bagi generasi milenial dan gen z harus melalui pendekatan yang lebih inovatif dengan menggunakan sosial media dan perkembangan teknologi lainnya. Sementara itu, Satori (2017) menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda juga harus dilakukan secara bertahap dan konsisten sehingga bisa menjadi akhlak atau budi pekerti yang mulia. Sementara itu, Aziz (2021) menemukan bahwa kesadaran generasi milenial dapat berubah menjadi sebuah gerakan yang lebih berdampak dengan menumbuhkannya diantara kelompok teman sebaya. Oleh karena itulah, rumusan SPS dalam proses dan penjelasan ini berusaha untuk mencermati berbagai temuan dan konsep tersebut.

## **METODE**

Pengabdian ini menggunakan metode partisipasi terlibat dimana fasilitator SPS bersama dengan peserta merumuskan bersama isi dan tujuan dari SPS. Melalui skema SPS tingkat menengah, maka pencapaian dan pembelajaran ditentukan bersama berdasarkan hasil kesepakatan diantara peserta dan juga dengan fasilitator. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran di SPS yang menggunakan model pembelajaran orang dewasa sehingga memungkinkan proses itu dapat terwujud. Ketika tulisan ini disusun, proses itu masih terus berjalan sesuai dengan kualitas komunikasi dan partisipasi dengan peserta SPS.

## PEMBAHASAN

SPS adalah produk yang dihasilkan dari nalar kritis terhadap ilmu sosial di Indonesia dan dunia pada umumnya. Mengikuti apa yang dikaji oleh Alatas (2010), bahwa terdapat persoalan irelevansi dalam ilmu sosial di dunia non Barat sebagai akibat dari imperialisme intelektual dan benak terbelenggu. SPS merupakan satu upaya kreatif untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan orientasi membangun kesadaran dan partisipasi politik.

Sebagai produk, SPS dikembangkan untuk dapat menjadi sebuah inovasi bagi perkembangan masyarakat sipil atau masyarakat madani di Indonesia. Untuk hal itu, maka produk SPS telah dikembangkan dalam tiga jenis produk yakni;

1. SPS dasar, merupakan paket sekolah politik dalam 10 pertemuan dengan 12 sesi (pertemuan 1 dan 10 terdiri dari 2 sesi) yang menjelaskan persoalan mendasar dari visi dan capaian minimal berupa kesadaran dan partisipasi politik. SPS dasar ini dibagi kepada tiga tahapan yang terdiri dari tahap pengantar dan pengenalan, tahap kajian dasar diskursus ilmu politik, serta tahap aktualisasi. SPS dasar terbuka untuk umum dan telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021.
2. SPS menengah, merupakan paket sekolah politik yang sesuai dengan kepentingan dan capaian yang diharapkan oleh penerima layanan. SPS menengah ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penerima layanan Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan SPS menengah ini yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.
3. SPS atas, merupakan paket sekolah politik yang dapat diikuti setelah mengikuti SPS dasar dengan berorientasi kepada pengembangan strategi politik dan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Praktik dari SPS atas ini belum terlaksana dan masih dalam pengkajian lebih lanjut untuk pengembangan produk.

SPS menengah dikembangkan sejalan dengan kerjasama yang berlangsung antara fasilitator SPS dengan PII dan IPM Kota Tasikmalaya. Dari kerjasama itu, kemudian memunculkan satu kesepakatan untuk mencapai kepentingan bersama dalam rangka membangun kesadaran dan partisipasi generasi muda, khususnya di tingkat pelajar di Kota Tasikmalaya. Indikator untuk mencapai hal tersebut adalah terbentuknya poros atau asosiasi pelajar dalam kepentingan kesadaran dan partisipasi politik.

Dalam hal ini, maka cara pandang SPS terhadap pembangunan kesadaran politik adalah proses partisipatif dan bukan sekedar pertemuan di ruang-ruang kelas. Penggunaan kata sekolah tidak menggambarkan sesuatu yang fisik, namun lebih menekankan kepada proses untuk mendorong transformasi kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, gagasan politik SPS mengacu kepada gagasan hegemoni dari Gramsci. Oleh karena itu, tiap pertemuan dengan panitia dari PII dan IPM pada dasarnya adalah proses sekolah itu sendiri. Dalam seluruh proses tersebut, SPS menengah ini telah dilaksanakan lima kali pertemuan sejak bulan April 2022 dengan materi pembahasan sebagai berikut;

1. Sejarah politik di Indonesia, peran pemuda dan perubahan yang terjadi. Pertemuan dilaksanakan sekitar 90 menit dengan membahas bagaimana sejarah politik di Indonesia hingga membawa konsekuensi pada keadaan politik di Indonesia saat ini. Proses pembelajaran dilakukan melalui proses diskusi santai dengan berbagai pertanyaan yang diajukan secara aktif oleh peserta. Peserta yang hadir adalah 5 orang yang terdiri dari pimpinan IPM dan PII. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022. Pada pertemuan pertama ini mulai muncul target capaian dan indikator dari capaian antara tersebut.
2. Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan diikuti oleh 5 orang yang sama pada pertemuan pertama. Pada pertemuan ini, diskusi dilakukan terkait dengan tema perubahan sosial dan konsep masyarakat sipil. Substansi dari masyarakat sipil dan bagaimana peran-peran yang dapat dikembangkan dalam system politik yang ada di Indonesia terutama pada politik di tingkat lokal. Pertemuan kedua ini dilaksanakan hampir selama dua jam dalam proses diskusi yang menarik dan kritis.
3. Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022. Pertemuan ketiga ini terjeda dua bulan dari pertemuan sebelumnya karena PII dan IPM Kota Tasikmalaya sedang mengadakan kegiatan pelatihan kepemimpinan pelajar di bulan Juni. Pada pertemuan ketiga ini, diikuti oleh 6 orang (bertambah satu orang) dengan kajian tentang kebijakan pemerintah di Kota Tasikmalaya. Kajian dilakukan melalui proses diskusi sebagaimana yang telah berlangsung pada dua pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini menghasilkan satu kesepakatan bersama tentang analisis kebijakan publik terhadap peraturan daerah terkait dengan kepemudaan. Maka disepakati satu pertemuan dengan tema analisis kebijakan publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2022.
4. Pertemuan keempat dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan jumlah peserta 15 orang dan dilaksanakan di warung bakso. Tema pertemuan ini adalah tentang analisis kebijakan publik, terutama ditinjau dari design proses kebijakan publik dalam tahap agenda setting serta formulasi kebijakan. Logis berpikir dan siklus dalam kebijakan publik untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah. Pertemuan ini terutama dilakukan karena ada keperluan dari kedua organisasi tersebut untuk melakukan analisis terhadap peraturan daerah tentang kepemudaan di Kota Tasikmalaya.
5. Pertemuan kelima dilakukan dalam jeda dua bulan karena setelah pertemuan kelima PII maupun IPM Kota Tasikmalaya melakukan kajian terhadap peraturan daerah tentang kepemudaan. Pada tanggal 9 Oktober 2022 pertemuan kelima dilakukan dengan pembahasan tentang peningkatan kesadaran dan partisipasi politik dari generasi muda. Analisis serta strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi khususnya dalam konteks Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri. Dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa akan ada deklarasi asosiasi pelajar tasik untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi politik yang akan dilakukan bertepatan dengan hari santri pada tanggal 22 Oktober 2022 di DPRD Kota Tasikmalaya.

Kegiatan tanggal 22 Oktober 2022 merupakan deklarasi dari asosiasi pelajar untuk kesadaran dan partisipasi politik yang diberinama MP3 atau Milenial Political Prosperous Peacefull. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 11 siang dengan pemaparan tentang konsep kesadaran dan partisipasi politik oleh fasilitator dari SPS. Materi pertama ini menunjukkan bagaimana peran dari generasi muda sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam system poltik di Indonesia.



**Gambar 1.** Pemaparan materi dari fasilitator SPS tentang kesadaran dan partisipasi politik generasi muda.

Kegiatan istirahat siang untuk melakukan makan dan solat dan diteruskan kembali pada puku 13 dengan pemateri dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan Ketua Komisioner KPUD Kota Tasikmalaya ditemani oleh ketua PII dan IPM Kota Tasikmalaya. Sesi yang kedua ini diisi oleh pengkajian yang sifatnya lebih teknis terkait dengan pemilu dan bagaimana partisipasi yang dapat dilakukan oleh para pelajar. Setelah sesi ini, acara selesai dan disepakati untuk melakukan proses tindak lanjut dalam kajian-kajian rutin MP3 setelah kegiatan ini.



**Gambar 2.** Dari sebelah kiri; Ketua KPUD Kota Tasikmalaya , Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dede, S.IP, Ketua PII dan IPM Kota Tasikmalaya.

## Analisis Kegiatan

Melakukan proses peningkatan kesadaran dan partisipasi politik bersama organisasi pelajar ini memberikan beberapa catatan penting. Hal pertama yang harus dituliskan adalah para pelajar itu tidak boleh diarahkan secara langsung yang memungkinkan hilangnya aspek inisiatif dan pengambilan risiko yang dilakukan oleh mereka. Ini penting untuk disampaikan di awal karena mengambil keputusan harus didasari atas inisiatif dan kehendak untuk mengambil risiko sehingga akan muncul satu kepemimpinan yang terlatih dan bertanggung jawab.

Hal tersebut yang menyebabkan SPS menengah sebagaimana yang ditunjukkan sebelumnya dilakukan dalam jeda yang cukup lama. Rata-rata adalah selama satu bulan dan terdapat dua pertemuan dengan jeda dua bulan. Meskipun terkesan lama dan tidak efisien, namun itu sebanding dengan pembelajaran dan pelatihan kepemimpinan yang didapat oleh organisasi kepelajaran tersebut. Dua hal terakhir itu lebih penting daripada sekedar mengejar efisiensi dari kegiatan.

Kedua, kegiatan mereka disibukan oleh banyak hal selain belajar dan tugas-tugas dalam kedudukan mereka baik sebagai pelajar di tingkat siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, banyak hal yang tak bisa dipaksakan meski target dan perencanaan mungkin telah disepakati sebelumnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa keadaan itu harus dibiarkan. Namun maksudnya ialah bahwa keterbatasan yang ada itu tidak membatasi SPS untuk berkolaborasi dalam berbagai keterbatasan yang ada. Fasilitator yang harus lebih banyak menyesuaikan diri supaya proses pendampingan dan komunikasi dapat terus berjalan.

Ketiga, berbagai kegiatan di internal organisasi juga memberikan kesibukan yang membuat capaian dari SPS tidak dapat dipaksakan dalam waktu yang relative cepat atau tidak terlambat. Persoalannya pentingnya adalah bahwa memang terdapat keterbatasan sdm di organisasi sehingga pembagian peran pun menjadi lebih sulit dilakukan. Keterbatasan sdm di organisasi bukan hanya terletak pada jumlah, namun juga pada aspek kualitas.

Keterbatasan kualitas pada sdm organisasi itu sesungguhnya sebagai sesuatu yang wajar mengingat bahwa kedua organisasi kepemudaan tersebut bukan organisasi dalam bidang politik, namun dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, membawa mereka pada kegiatan yang bukan dalam kebiasaannya memang sesuatu yang sulit tetapi tetap harus dilakukan. Maka, berbagai hambatan itu dapat dimaklumi sebagai satu proses yang wajar.

SPS menengah yang dilakukan pada tahun ini telah menunjukkan bahwa proses peningkatan kesadaran dan partisipasi politik pada generasi muda dapat dilakukan dalam proses kolaborasi. Dalam lingkup yang lebih besar, hal ini sebenarnya menunjukkan bagaimana perguruan tinggi dapat berperan di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat sipil atau asosiasi masyarakat.

SPS tahun ini juga telah mampu menahan dan menyalurkan aspirasi politik dari organisasi pelajar untuk tetap dapat berpartisipasi dalam politik tanpa harus menjadi bagian dari salah satu peserta atau kontestan. SPS telah mampu memberikan mereka kesadaran untuk mengambil peran dalam *high politic*



dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Ini penting disebutkan karena selama proses beberapa organisasi kepemudaan dan pelajar yang lainnya yang coba diajak berkolaborasi telah asyik dalam aktifitas politik yang memihak kepada satu golongan atau kontestan tertentu daripada kepada nilai – nilai politik atau *high politic*.



**Gambar 3.** Beberapa peserta dan panitia berfoto bersama setelah sesi 2 pada acara tanggal 22 Oktober 2022.

## SIMPULAN

### Kesimpulan

SPS telah mampu mendorong lahirnya kesadaran dan partisipasi dari generasi muda. Meskipun sulit untuk diukur secara kuantitatif, namun proses ini adalah dasar bagi upaya-upaya yang berkelanjutan. Membangun kesadaran dan partisipasi politik, khususnya di generasi muda memang bukan perkara mudah. Mereka melihat dan mempunyai pandangan terhadap realitas atau kenyataan politik. Ketika nilai-nilai yang ideal dihadapkan dengan kenyataan itu, mereka harus mengambil sikap yang tidak mudah.

Dalam hal inilah SPS memberikan satu ruang bagi mereka untuk melakukan refleksi sekaligus penguatan bahwa harapan dan peluang untuk perubahan itu masih tetap ada. Lebih jauh dari itu, sesungguhnya semua usaha itu bukan tentang peluang dan perubahan itu, akan tetapi tentang posisi diri dari keseluruhan keadaan yang dapat dipahami. Menempatkan pada kesadaran inilah yang terpenting, sehingga menjadi sebuah nilai *civility* yang memungkinkan bagi terwujudnya masyarakat sipil yang tangguh dalam menghadapi keadaan politik yang tidak ideal.

## Saran

SPS harus mampu menjadi sebuah inovasi yang dapat diduplikasi atau diaplikasikan secara luas dan diterima oleh publik. Tahapan untuk sampai kepada inovasi memang membutuhkan difusi yang baik melalui proses yang tidak cepat dan mudah. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi salah satu media komunikasi yang penting untuk mampu menyampaikan gagasan dan praktik ini kepada setiap pihak yang dapat diajak berkolaborasi untuk mewujudkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AZIZ, F. I. (2021). *POLITIK IDENTITAS KOMUNITAS KEPEMUDAAN (Studi Kasus Paguyuban Pemuda 13 di Perum Kertasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis)* (skripsi, Universitas Siliwangi)
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal UNIERA*, 2(2), 26-52.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edwards, Michael.(2011). *Civil Society*. UK: Polity Press.
- Gramsci, Antonio.(1992). *Selections From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.. Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith.
- Harvey, David. (2023). *A Companion to Marx's Grundrisse*. London: Verso.
- Heywood, Andrew. (2019). *Politics*. Red Globe Press.
- <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>
- Huntington, S. P. (1997). *Gelombang demokrasi Ketiga*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- McLennan, Gregor. (2003). *Maintaining Marx*. London. Sage.
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millennial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Satori, A., Andrias, M. A., & Mubarak, H. (2017). IbP Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Santri Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 3(1).
- Suryadi, Adi. (2006). *Rekontruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.